

ANALISIS FAKTOR PENENTU KEAKTIFAN PENGURUS DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN KOPERASI SYARIAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

AN ANALYSIS ON ACTIVENESS DEFINING FACTORS OF MANAGEMENT IN INCREASING FINANCIAL PERFORMANCE OF SHARIA COOPERATIVE IN YOGYAKARTA SPECIAL REGION PROVINCE

Tirta Sari dan Amelia Pratiwi

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Email : tirtasari0210@gmail.com

amelia.utomo@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh keaktifan pengurus (yang diukur dengan indikator transparansi, akuntabilitas, DPS dan motivasi anggota) terhadap kinerja keuangan koperasi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisis SEM-PLS, setiap indikator dinilai berdasarkan pengukuran skala likert. Penelitian dilakukan di koperasi syariah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, DPS dan motivasi anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap keaktifan pengurus, akan tetapi keaktifan pengurus berpengaruh secara negatif terhadap kinerja keuangan, hal ini ditunjukkan dengan nilai β sebesar -0.19.

Kata Kunci : Koperasi Syariah, Kinerja Keuangan, Keaktifan Pengurus

Abstract

This research is conducted in order to find out the influence of management activeness (measured by the indicators of transparency, accountability, DPS and motivation of the members) towards the financial performance of sharia cooperative. It used quantitative method with analysis tool of SEM-PLS, and every indicator was measured based on the Likert scale. This research was conducted in sharia cooperatives in Yogyakarta Special Region province. The result of the research shows that transparency, accountability, DPS and motivation of the members have positive influence the management activeness, but management activeness have negative influence toward the financial performance, shown by the β value of -0.19.

Keywords: Sharia Cooperative, Finance Performance, Management Activeness

Pendahuluan

Indonesia sejak dahulu telah dikenal sebagai sebuah bangsa yang erat ikatan kekeluargaan dan gotong royongnya. Koperasi lahir sebagai sebuah bentuk upaya untuk memberdayakan pengusaha kecil dan menengah agar mampu menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan professional, yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dapat mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam perekonomian.

Seiring berjalannya waktu ekonomi di Indonesia terus berkembang, diantaranya ialah dengan munculnya ekonomi Islam, kemudian lahir perbank Islam, tidak hanya sampai disitu saja, ekonomi Islam pun telah merambah ke sektor mikro, adanya lembaga keuangan mikro ekonomi Islam yang memiliki peranan sebagai lembaga social keagamaan yang lebih dikenal dengan istilah BMT (*Baitul Mall Wa Tamwil*).

Di Indonesia BMT yang telah melakukan perubahan dalam bentuk usaha, menjadi sebuah koperasi maka selanjutnya BMT tersebut dapat disebut sebagai koperasi syariah karena telah berbadan hukum koperasi sehingga jalurnya harus sesuai dengan ketentuan perkoperasian yang sudah ada, yang mana hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, didalamnya dinyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sehingga peranan koperasi syariah memiliki andil dalam membangun serta memajukan potensi ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan syariat Islam, serta dapat terciptanya sebuah kehidupan rakyat yang sejahtera disegala sektor termasuk dalam sektor ekonomi dan sosial.

Salah satu provinsi yang memiliki koperasi syariah yang cukup banyak dan terus berkembang ialah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan koperasi syariah di DI Yogyakarta disebut sebagai barometer koperasi syariah di Indonesia, hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah dan produktivitasnya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutardi, pada sebuah wawancara yang kemudian dimuat dalam koran¹.

¹ Nugraha Wahyu Singgih. *Nilai Aset BMT di Yogya Tumbuh Hingga 900 miliar*. Diakses dari <http://jogja.tribunnews.com/2015/11/11/aset-bmt-di-yogya-tumbuh-hingga-rp-900-miliar>. pada tanggal 28 Mei.

Nominal aset yang dimiliki BMT di kota Yogyakarta secara signifikan hingga mencapai Rp. 900 milyar lebih. Selaku pimpinan ABSINDO (Asosiasi BMT Seindonesia) kota Yogyakarta, Saiful Rijal menuturkan, sekarang terdapat kurang lebih 40 BMT di Kota Yogyakarta yang telah melayani beberapa produk layanan secara aktif. Aset BMT rata-rata mengalami peningkatan 40 persen pertahun, di D.I Yogyakarta sendiri mangsa pasarnya yang cukup tinggi. Tentu keberhasilan setiap BMT tersebut tidak luput dari peranan para pengurus disetiap koperasi.

Keberhasilan sebuah lembaga, seperti halnya Koperasi syariah tidak lepas dari peran pengurus, karena salah satu faktor penentu dalam keberhasilan usaha koperasi syariah ialah terletak pada pengurusnya, karena pengurus sebagai pemimpin merupakan kunci keberhasilan sebuah organisasi, kemudian munculah sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa pemimpinlah yang bertanggung jawab atas kegagalan suatu pekerjaan, hal ini menunjukkan bahwa peran seorang pemimpin dalam sebuah organisasi/lembaga sangatlah penting².

Oleh sebab itu, pengurus yang cerdas, terampil, serta amanah dalam menjalankan tugas-tugasnya, akan membuat koperasi dibawah kepemimpinannya dapat berkembang, maju, serta dapat pula meningkatkan kinerja keuangan. Sehingga mampu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dan dapat menjadi sebuah sarana dalam pembangunan ekonomi³.

Tentunya ada faktor yang menentukan keberhasilan sebuah koperasi syariah, salah satunya ialah faktor keaktifan pengurus. Keaktifan pengurus dapat dilihat dari tatacara para pengurus dalam menjalankan serta mengelola koperasi. Terdapat ruang lingkup dalam tata kelola, yakni (1) eksternal, yang mana didalamnya terdapat faktor transparansi, (2) internal yang didalamnya terdapat faktor akuntabilitas. Selain itu, adanya pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah dapat pula menjadi sebuah dorongan atau dengan kata lain faktor yang dapat membuat pengurus lebih giat lagi dalam menjalankan tugasnya, disamping itu sudah barang tentu anggota juga memiliki andil dalam menentukan keaktifan pengurus, adapun cara menilainya ialah dengan melihat sejauh mana pengurus dalam memberikan motivasi terhadap

² Sukamidiyanto. Ign. *Manajemen koperasi*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm.116.

³ Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta,1992.

anggotanya⁴. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah transparansi, akuntabilitas, motivasi anggota dan DPS memiliki pengaruh terhadap keaktifan pengurus serta untuk mengetahui apakah keaktifan pengurus memiliki pengaruh dalam meningkatkan kinerja keuangan koperasi syariah di Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif. menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, kuesioner, dan mendapatkan dokumen berupa laporan keuangan, selanjutnya untuk menggali informasi lebih dalam lagi serta memakanai data berupa angka-angka yang sebelumnya telah di dapat, maka selanjutnya akan dilakukan wawancara dan terhadap informan yang mengetahui secara persis objek penelitian, informan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pengurus koperasi.

Lokasi penelitian terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang meliputi lima Kabupaten, yakni Kota Yogyakarta, Bantul, Kulonprogo, Sleman dan Gunung Kidul. Sedangkan untuk objek penelitiannya ialah BMT yang telah berbadan hukum koperasi / KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di D.I Yogyakarta yang telah rutin memberikan laporan pertanggungjawaban serta laporan keuangannya kepada dinas koperasi dan UKM Provinsi D.I Yogyakarta . Dalam penelitian ini teknik penarikan sampel menggunakan teknik *non probability sampling* yakni *sampling purposive* . menurut (Sugiono, 2015:67) *sampling purposive* ialah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun ketentuan dalam pemilihan sampelnya ialah sebagai berikut:

1. BMT yang telah berbadan hukum Koperasi dan di bidang jasa keuangan, atau dapat di sebut KSPPS
2. BMT yang telah melakukan pelaporan terkait dengan laporan keuangan dan pertanggungjawaban kepada dinas koperasi provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

⁴ Munaldus, dkk, *Kiat mengelola Credit Union*, PTElex MediaKomputindo, Jakarta, 2014, hlm. xxxviii.

3. BMT yang memiliki laporan keuangan lengkap dari tahun 2016-2017

Pada penelitian ini data diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan wawancara. Data yang terkumpul akan digunakan sebagai media untuk menguraikan masalah yang ada, oleh sebab itu data-data yang didapat harus benar-benar akurat dan terpercaya. Dalam kuesioner ini nantinya akan terdapat rancangan pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian. Selain itu teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dilakukan guna mendapatkan tambahan informasi yang lebih mendalam terkait dengan masalah yang diteliti .

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder dan data primer.⁵ Data primer merupakan data –data yang didapat dari pencarian langsung yang dilakukan oleh peneliti. Kuesioner dan wawancara terstruktur merupakan media atau alat yang digunakan peneliti untuk menggali lebih banyak data dari responden.

Adapun sumber data, menurut Willy dan Jogiyanto terbagi menjadi dua yakni sebagai berikut : pertama ialah sumber primer, merupakan data yang diperoleh dari pihak pertama yang memiliki data. Kedua ialah sumber sekunder merupakan data yang diperoleh dari tangan kedua dari pemilik data⁶. Dalam pengumpulan data skunder peneliti menggunakan dokumentasi, jurnal, buku dan berupa laporan keuangan koperasi syariah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk menambah serta mengali informasi yang lebih mendalam, peneliti menggunakan data primer. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mengelompokkan laporan keuangan berdasarkan tahun dari seluruh BMT /KSPPS yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah data primer terkumpul selanjutnya ialah mengumpulkan data sekunder melalui kuesioner yang akan diberikan kepada setiap pengurus KSPPS yang telah ditentukan.

Uji data merupakan tahap selanjutnya guna mendapatkan hasil dari kuesioner dan dalam melihat keabsahan dan validitas data, menggunakan SEM-PLS dengan alat penguji berupa aplikasi warp pls 6.0. PLS (*Partial Least Square*) ialah sebuah analisis yang memiliki persamaan structural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat

⁵ Abdillah, Willy. *Partial Least Square : Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis*, ANDI, Yogyakarta, 2011.

⁶ *Ibid*

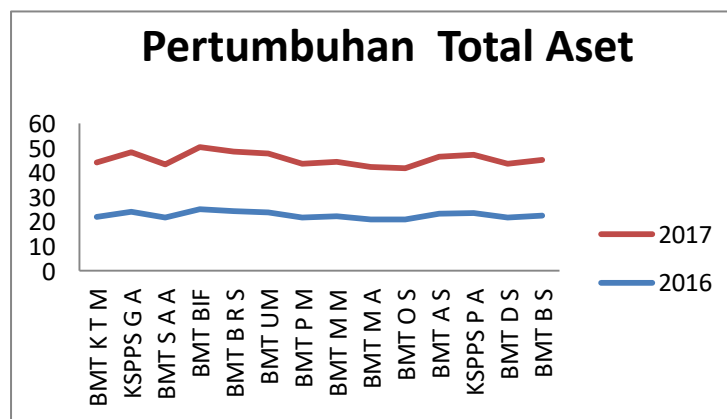
dilakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis menggunakan prediksi).

Uji Validitas terdiri atas konvergen dan diskriminan. Dalam PLS uji validitas konvergen untuk konstruk reflektif, syarat validitas yang harus dipenuhi ialah: (1) *Outer Loading* wajib lebih besar dari 0,70. (2) Nilai p-value kurang dari 0.05 Disamping ketentuan yang telah disebutkan diatas apabila terjadi *loading* lebih besar dari 0.70 yang tidak terpenuhi, biasanya hal ini terjadi pada kuesioner yang baru dikembangkan, oleh sebab itu *loading* dengan rentang 0,40-0.70 perlu dipertimbangkan untuk tetap dipertahankan⁷.

Validitas Diskriminan, dapat diukur dengan cara membandingkan hasil dari akar AVE dari setiap konstruk serta korelasi antar konstruk terhadap konstruk lainnya. Reliabilitas digunakan untuk mengukur reliabilitas dilakukan dengan cara melihat nilai dari *Cronbach's alpa* serta *composite reability* dan keduanya harus bernilai lebih besar dari 0,70. Akan tetapi Hair menyatakan apabila *Cronbach's alpa* serta *composite reability* bernilai sebesar 0,60 maka masih bisa diterima⁸.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pertumbuhan Total Aset



Sumber: Dinas Koperasi Provinsi DIY (diolah)

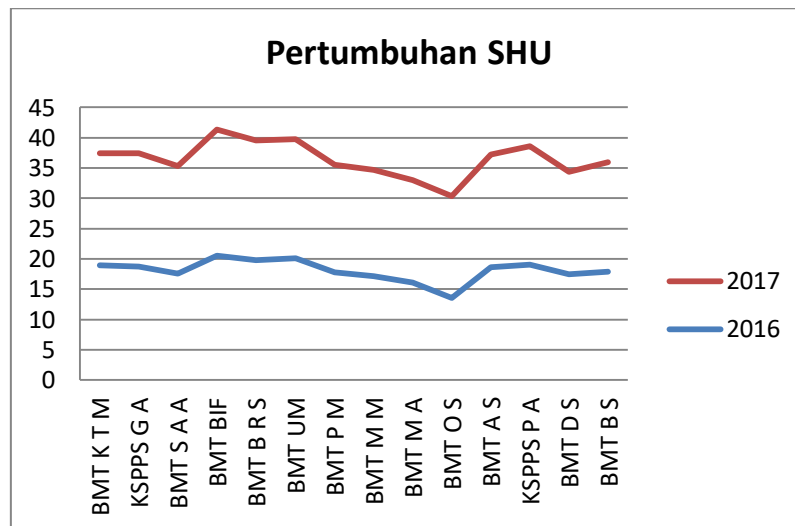
⁷ Sholihin,P dan Dwi Ratmono. *Analisis SEM-PLS dengan Warp PLS 3.0: Untuk Hubungan non linier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*, ANDI. Yogyakarta, 2013.

⁸ Abdillah, Willy. (2015) *Partial Least Square :Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis*, ANDI, Yogyakarta, hal. 195-196.

Gambar 4. 1 Pertumbuhan Total Aset Tahun 2016-2017

Berdasarkan Gambar diatas,menunjukkan bahwa perkembangan aset setiap koperas syariah yang ada provinsi DIY berkembang secara fluktuaktif, dan lebih cenderung kearah yang positif, karena sebagian besar koperasi syariah dari tahun 2016-2017 total asetnya selalu mengalami peningkatan. Koperasi syariah dengan total aset yang paling tinggi diantara 14 koperasi syariah diatas ialah BMT BIF, hal ini dikarenakan BMT BIF telah memiliki banyak kantor cabang yang tersebar disetiap daerah di Yogyakarta.

b. SHU

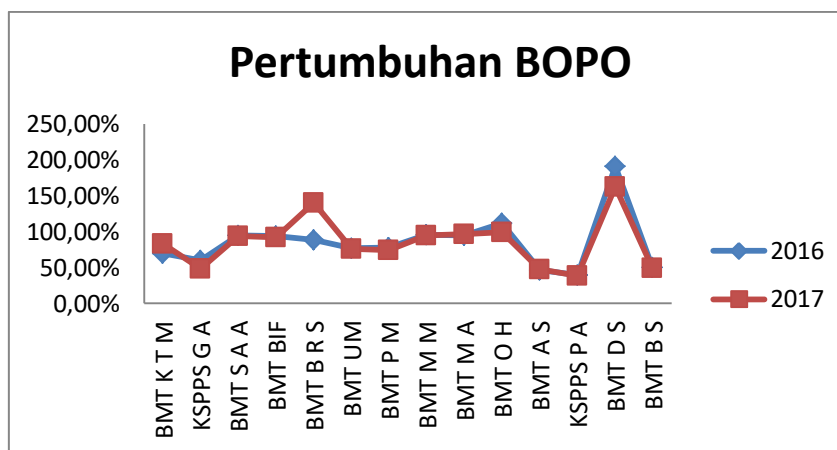


Gambar 4. 2 Pertumbuhan SHU Tahun 2016-2017

Sumber: Dinas Koperasi Provinsi DIY (diolah)

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa dari tahun 2016-2017 setiap koperasi syariah mengalami peningkatan, baik secara signifikan maupun tidak signifikan, dalam artian SHU nya meningkat sangat banyak atau sebaliknya meningkat sedikit.

c. BOPO



Gambar 4. 3 Pertumbuhan BOPO Tahun 2016-2017

Sumber: Dinas Koperasi DIY (diolah)

Berdasarkan Gambar diatas menunjukkan bahwa BOPO mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Dan nilai BOPO cenderung besar, hal ini menunjukkan pula bahwa koperasi syariah di provinsi DIY kurang efisien atau dengan kata lain belum maksimal dalam mengelola biaya oprasionalnya.

Uji Validitas Konvergen ialah komponen dari *measurement* model yang terdapat pada SEM-PLS yang biasanya dikenal dengan sebutan *outer model*. Ada dua ketentuan dalam menilai *outer model* sesuai syarat validitas konvergen bagi reflektif yakni (1)*Loading* mesti lebih dari 0,70, (2) P signifikan kurang dari 0,05 yang dilihat pada *Combined loading and cros loading*⁹, berikut ini sajian output *Combined loading and cros loading*:

Tabel 4. 1 *Combined loading and cros loading* variabel transparansi

	Transparansi	P value	keterangan
P7	(0.617)	0.380	Valid
P8	(0.597)	0.363	Valid
P9	(0.794)	0.348	Valid
P10	(0.678)	0.387	Valid
P11	(0.725)	0.329	Valid

⁹ Sholihin,P dan Dwi Ratmono. *Analisis SEM-PLS dengan Warp PLS 3.0: Untuk Hubungan non linier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*, ANDI. Yogyakarta, 2013.hal.65.

P12	(0.045)	0.464	Valid
P13	(0.614)	0.322	Valid
P14	(0.719)	0.325	Valid

Sumber: Pengolahan data dengan WarpPLS 6.0, 2019

Tabel 4. 2 Combined Loading and Cros Loading Akuntabilitas

	Akuntabilitas	P Value	Keterangan
P15	(0.574)	<0.001	Valid
P16	(0.605)	<0.001	Valid
P17	(0.587)	<0.001	Valid
P18	(0.701)	<0.001	Valid
P19	(0.749)	<0.001	Valid
P20	(0.726)	<0.001	Valid
P21	(0.758)	<0.001	Valid
P23	(0.789)	<0.001	Valid
P24	(0.793)	<0.001	Valid
P25	(0.691)	<0.001	Valid
p27	(0.695)	<0.001	Valid

Sumber: Pengolahan data dengan WarpPLS 6.0, 2019

Tabel 4. 3 Combined loading and cros loading DPS

	DPS	P Value	Keterangan
P28	(0.776)	<0.001	Valid
P29	(0.887)	<0.001	Valid
P30	(0.882)	<0.001	Valid
P31	(0.805)	<0.001	Valid
P32	(0.806)	<0.001	Valid
P33	(0.787)	<0.001	Valid

Sumber: Pengolahan data dengan WarpPLS 6.0, 2019

Tabel 4. 4 Combined loading and cros loading motivasi anggota

	Motivasi	P Value	Keterangan
--	-----------------	----------------	-------------------

Anggota			
P34	(0.815)	<0.001	Valid
P35	(0.886)	<0.001	Valid
P36	(0.663)	<0.001	Valid
P38	(0.820)	<0.001	Valid
P39	(0.706)	<0.001	Valid

Sumber: Pengolahan data dengan WarpPLS 6.0, 2019

Hasil pengolahan data *convergent validity* yang dilihat melalui nilai *loading factor* pada table 4.2, 4.3, 4.4. dapat disimpulkan bahwa semua indikator memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari 0,4 terhadap variable latennya. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator pada tiap variable tersebut telah memenuhi standart *Convergent Validity* serta dinilai baik.

¹⁰Adapun kriteria yang digunakan untuk mengukur validitas diskriminan ialah akar kuadrat (*square roots*) *average variance extracted (AVE)* harus lebih tinggi dari korelasi antar variabel laten pada kolom yang sama (di atas atau di bawahnya). Apabila tidak terpenuhi maka validitas diskriminan rendah atau dapat diartikan bahwa terdapat indikator yang memiliki *loading* yang kuat pada banyak variabel laten. Apabila hal in terjadi maka peneliti harus memperhatikan kembali nilai *loading* dan *cross-loadings* guna memastikan indikator yang *redundant* serta memperhitungkan untuk mengeliminasinya.

Tabel 4. 5 Cross loading

	Transparansi	Akuntabilitas	DPS	Motivasi	P Anggota	keterangan
					value	
P9	(0.794)	0.000	-0.163	-0.255	0.348	Valid
P11	(0.725)	0.000	0.302	0.498	0.329	Valid
P13	(0.614)	0.000	-0.544	-0.664	0.322	Valid
P14	(0.719)	0.000	-0.552	-0.523	0.325	Valid

¹⁰ Sholihin,P dan Dwi Ratmono. *Analisis SEM-PLS dengan Warp PLS 3.0: Untuk Hubungan non linier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*, ANDI, Yogyakarta, 2013.hal.47.

P16	-0.062	(0.605)	-0.156	-0.405	<0.001	Valid
P18	-0.756	(0.701)	-0.878	-0.798	<0.001	Valid
P19	-1.475	(0.749)	-1.023	-1.503	<0.001	Valid
P20	-0.582	(0.726)	-0.615	-0.455	<0.001	Valid
P21	-0.125	(0.758)	-0.518	-0.296	<0.001	Valid
P23	-1.101	(0.789)	-0.545	-0.642	<0.001	Valid
P24	-0.639	(0.793)	-0.394	-0.621	<0.001	Valid
P25	-0.240	(0.691)	-0.249	-0.118	<0.001	Valid
P29	0.195	0.000	(0.887)	0.116	<0.001	Valid
P30	0.312	0.000	(0.882)	0.044	<0.001	Valid
P31	-0.234	0.000	(0.805)	-0.317	<0.001	Valid
P32	-0.108	0.000	(0.806)	-0.182	<0.001	Valid
P33	0.631	0.000	(0.787)	0.760	<0.001	Valid
P35	0.121	0.000	-0.048	(0.886)	<0.001	Valid
P36	-0.911	0.000	-0.529	(0.663)	<0.001	Valid
P38	0.473	0.000	0.379	(0.820)	<0.001	Valid
P39	-0.052	0.000	0.231	(0.706)	<0.001	Valid

Sumber: Pengolahan data dengan WarpPLS 6.0, 2019

Tabel 4. 6 Hasil Akar Kuadrat AVE

	Transparansi	Akuntabilitas	DPS	Motivasi Anggota
Transparansi	(0.779)	0.763	0.420	0.564
Akuntabilitas	0.763	(0.770)	0.473	0.619
DPS	0.420	0.473	(0.825)	0.325
Motivasi Anggota	0.564	0.619	0.325	(0.831)

Composite Reliability, berguna dalam menguji tingkat konsistensi setiap jawaban yang diujikan. Menurut Hair, Shulihin (2013) nilai *composite reliability* harus lebih besar dari 0,7 meskipun nilai 0,6 masih dapat diterima. Maka suatu indikator dapat dikatakan memiliki tingkat reliabilitas yang baik jika nilai *composite reliability* lebih

besar atau sama dengan 0,7. Adapun hasil Uji Reliabilitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 7 Composite Reliability

Transparansi	Akuntabilitas	DPS	Motivasi Anggota
0.862	0.914	0.927	0.889

Sumber: Pengolahan data dengan WarpPLS 6.0, 2019

Tabel 4. 8 Cronbach's alpha

Transparansi	Akuntabilitas	DPS	Motivasi Anggota
0.811	0.896	0.905	0.841

Sumber:

Pengolahan data dengan WarpPLS 6.0, 2019

Terlihat pada tabel diatas, secara umum indikator-indikator pada setiap variable sudah terpenuhi atau dengan kata lain indikator-indikator telah reliabel. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Fornell dan Lacker; Nunnaly dalam Solihin(2013:73) nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* harus lebih dari 0,70.

¹¹Dalam melakukan penilaian terhadap variable laten formatif dengan menggunakan dua kriteria yang harus dipenuhi, yakni (1) nilai p kurang dari 0,05 (signifikan), (2) nilai dari VIF yang kurang dari 3,3. Apabila kedua kriteria tersebut telah terpenuhi maka pengukuran konstruk formatif dikatakan layak.

Berbeda pandangan dengan Kock, Hair, dalam Solihin (2013) mengemukakan bahwa perlu kehati-hatian dalam mengeliminasi indikator, karena dieliminasi indikator pada variable laten formatif dapat berakibat pada terjadinya perubahan isi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, dalam kasus ini harus lebih cermat dalam melihat bagaimana kontribusi indikator yang ada pada nilai *loading*-nya. Apabila nilai *loading* berada di lebih dari 0,50, dan indikatornya tidak signifikan maka indikator harus dipertahankan. Begitupun sebaliknya, ketika nilai *loading* dibawah 0,50 namun

¹¹ Sholihin,P dan Dwi Ratmono. *Analisis SEM-PLS dengan Warp PLS 3.0: Untuk Hubungan non linier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*, ANDI, Yogyakarta, 2013.hal.70.

indikatornya signifikan, maka dapat dipertimbangkan dari perspektif relevansi teoritis. Selain itu, jika dihapusnya indikator akan berakibat pada berubahnya isi konstruk, maka sebaiknya untuk mempertahankan indikator tersebut.

Tabel 4. 9 Indicator Weight

	P value	VIF
lv_Transparansi	< 0.001	2.236
lv_Akuntabilitas	< 0.001	2.946
lv_DPS	< 0.001	1.346
lv_Motivasi	< 0.001	2.145
Anggota		
Aset	< 0.001	1.258
SHU	< 0.001	1.258

Sumber: Pengolahan data dengan WarpPLS 6.0, 2019

Sebagaimana yang tertera pada Gambar 4.15, dan hasilnya semua indikator telah memenuhi kriteria validitas untuk indikator-indikator dari variable laten formatif yakni dengan p-value (<0.001) dan VIF (< 3,3).

Tabel 4. 10 Path Coefficients

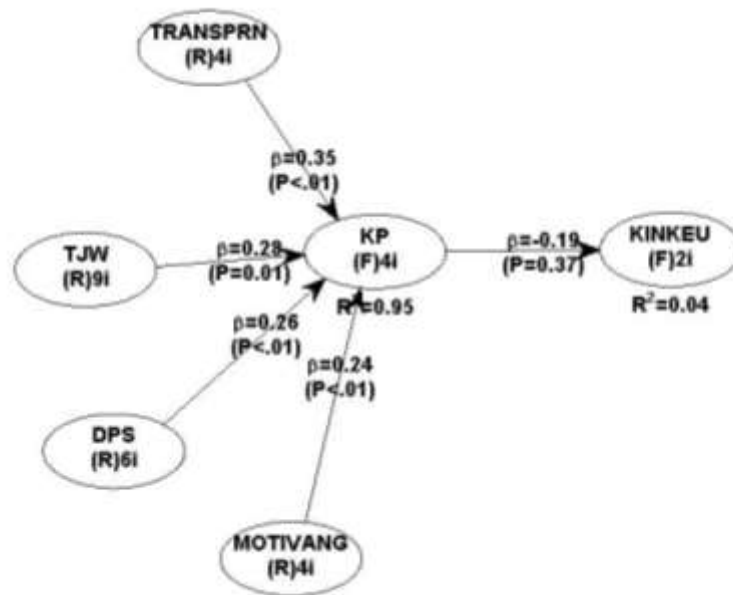
<i>Path</i>						
<i>Coefficients</i>						
	Transparansi	TJW	DPS	MotivAng	KP	KINKEU
KP	0.348	0.278	0.257	0.235		
KINKEU						-0.190

Sumber: Pengolahan data dengan WarpPLS 6.0, 2019

Tabel 4. 11 P-Values

P-Values						
	Transparansi	TJW	DPS	MotivAng	KP	KINKEU
KP	0.003	0.014	< 0.001	0.005		
KINKEU						0.368

Sumber: Pengolahan data dengan WarpPLS 6.0, 2019



Gambar 4. Model Penelitian

Pada gambar 1. diatas menggambarkan bahwa keaktifan pengurus memiliki pengaruh secara tidak langsung (negatif) yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, dengan nilai *p-value* diatas 0.01, yang mana seharusnya dilai p-valuenya adalah < 0.05 . Disisi lain, nilai koefisien β bernilai negatif yakni - 0,19. Pengujian hipotesis melalui dasar pengambilan keputusan yakni:

- a) *p-value* $> 0,05$, maka H_0 diterima
- b) *p-value* $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

berikut uraian pengujian hipotesis:

1) Uji hipotesis 1

H_0 : Transparansi tidak berpengaruh terhadap keaktifan pengurus

H_1 : Transparansi memiliki pengaruh terhadap keaktifan pengurus

Sebagaimana yang tertera tabel 4.17 dan 4.18. H_1 dinyatakan diterima dan H_0 tertolak. Hal ini, tercermin dari nilai *p-value*nya < 0.05 yakni sebesar (< 0.01), sehingga transparansi dalam penelitian ini dapat menjadi vareibel dalam mengukur keaktifan pengurus. **Diterima**

2) Uji Hipotesis 2

H_0 : Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap keaktifan pengurus

H_2 : Akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap keaktifan pengurus

Sebagaimana yang tertera pada tabel 4.17 dan 4.18. H2 dinyatakan diterima dan Ho ditolak, hal ini tercermin dari nilai p- valuenya < 0.05 yakni sebesar (<0.01), sehingga akuntabilitas dalam penelitian ini dapat menjadi variabel dalam mengukur keaktifan pengurus. **Diterima.**

3) Uji Hipotesis 3

Ho: DPS tidak berpengaruh terhadap keaktifan pengurus.

H3: DPS memiliki pengaruh terhadap keaktifan pengurus.

Sebagaimana yang tertera pada tabel 4.17 dan 4.18. Ha dinyatakan diterima dan Ho ditolak, hal ini tercermin dari nilai p- valuenya < 0.05 yakni sebesar (<0.01), sehingga DPS dalam penelitian ini dapat menjadi variabel dalam mengukur keaktifan pengurus. Kesimpulannya H3 **Diterima**

4) Uji hipotesis 4

H0: Motivasi anggota tidak berpengaruh terhadap keaktifan pengurus

H4: Motivasi Anggota memiliki pengaruh terhadap keaktifan pengurus

Sebagai mana yang tertera pada tabel 4.17 dan 4.18 , Ha dinyatakan diterima dan Ho ditolak, hal ini tercermin dari nilai p- valuenya < 0.05 , yakni sebesar (<0.01). Sehingga motivasi anggota dapat menjadi variabel dalam mengukur keaktifan pengurus. Kesimpulannya H4 **Diterima.**

Nilai R^2 pada keaktifan pengurus adalah 0.95, dapat dilihat pada gambar 4.6, hal ini menunjukkan bahwa keaktifan pengurus sebesar 95% mampu dijelaskan atau dengan kata lain di pengaruhi oleh ke empat variabel laten, yakni transparansi,akuntabilitas,DPS dan motivasi anggota. dan 5% sisanya dijelaskan oleh variabel lain, yang tidak tercantum dalam penelitian ini.

5) Uji Hipotesis 5

Ho: Keaktifan pengurus tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan

H5: Keaktifan pengurus berpengaruh terhadap keaktifan pengurus.

Sebagai mana yang tertera pada gambar 4.7, H5 dinyatakan ditolak dan Ho di terima hal ini tercermin dari nilai p- valuenya lebih besar dari 0.05 yakni sebesar (0.37). Dapat disimpulkan bahwa hipotesis 5 **Tertolak.** Dengan kata kalin keaktifan pengurus berpengaruh tidak langsung (negatif) dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan yang mana dapat dilihat dari β yang bernilai -0,019.

Nilai R^2 pada kinerja keuangan adalah 0.04 dapat dilihat pada gambar 4.6, hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan sebesar 4 % dijelaskan oleh keaktifan pengurus atau dengan kata lain dalam peningkatan kinerja keuangan di pengaruhi oleh keaktifan pengurus sebanyak 4%, dan 96% nya dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak tercantum dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penentu keaktifan pengurus dalam meningkatkan kinerja keuangan koperasi syariah. Variabel yang akan dinilai ialah keaktifan pengurus yang dibentuk berdasarkan empat faktor yakni (1) transparansi, (2) Akuntabilitas, (3) DPS dan (4) motivasi anggota dan menganalisis faktor penentu keaktifan pengurus dalam meningkatkan kinerja keuangan.

Analisis data telah dilakukan mulai dari tahap awal yakni validitas dan reabilitas data, pada tahap awal olah data untuk validitas konvergen terdapat beberapa indikator yang tidak valid terlihat pada tabel 4.1, sehingga indikator yang tidak valid harus dieliminasi.

Pada tahap pengolahan data, ada beberapa indikator dalam variabel laten transparansi yang terpaksa harus dieliminasi, agar data yang dihasilkan sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang ada, terlihat pada tabel 4.2. H1 yang dikemukakan terkait dengan transparansi memiliki pengaruh terhadap keaktifan pengurus dinyatakan diterima, yang mana pengaruhnya positif serta signifikan hal ini terlihat pada nilai p- valuenya yakni sebesar (<0.01). Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa di Yogyakarta hampir seluruh koperasi syariah telah menjalankan transparansi (keterbukaan) yang baik terkait dengan laporan keuangan. Hal ini mencerminkan bahwa pengurus serta pengelolalan koperasi dapat dikatakan telah berperan aktif dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

¹²Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk perwujudan dari sejauh mana seseorang mampu mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukannya maupun tindakan mereka yang berada dibawah tanggungjawabnya. Dalam pasal

¹² Munaldus, dkk, *Kiat mengelola Credit Union*, PTElex MediaKomputindo, Jakarta, 2014.

30 tahun 1992 UUD perkoperasian, pertanggung jawaban pelaksanaan tugas merupakan salah satu tugas dari pada seorang pengurus koperasi.

Pada hasil akhir olah data, hipotesis mengenai akuntabilitas terhadap keaktifan pengurus, dinyatakan diterima, dimana akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keaktifan pengurus, yang mana dapat dilihat dari β yang bernilai positif yakni sebesar 0,27 dan p-valuenya sebesar (< 0.01). Nominal ini menjelaskan bahwa, apabila terjadi peningkatan penilaian terhadap akuntabilitas, maka keaktifan pengurus semakin aktif.

Dewan pengawas syariah (DPS) ialah mereka yang diberikan wewenang untuk menjadi pengawas bagi setiap koperasi syariah, dan memiliki kewajiban untuk senantiasa membuat laporan pertanggungjawaban, menegur atau memberikan sanksi kepada pengurus yang melakukan kegiatan perkoperasian yang bertentangan dengan syariah, seperti menjalankan transaksi yang tidak sesuai dengan akad. DPS yang dimaksud disini ialah mereka yang melakukan pengawasan terkait manajemen kesyariahan koperasi syariah. Contohnya memastikan seluruh transaksi yang dilakukan oleh setiap koperasi syariah sudah sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam proses akhir pengolahan data dan pada uji hipotesis, variabel DPS dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keaktifan pengurus, yang mana dapat dilihat dari β yang bernilai positif yakni sebesar 0,24 dan p-value sebesar < 0.01 . Hasibuan (2003:95) mendefinisikan motivasi sebagai pemberian daya penggerak yang dalam pergerakannya melibatkan keghairahan kerja seseorang agar mereka memiliki keinginan untuk bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Hasibuan menjelaskan bahwa ada faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang mampu bertindak sebagai motivator sehingga seseorang bersedia bekerja sama.

Variabel motivasi anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap keaktifan pengurus, yang mana dapat dilihat dari β yang bernilai positif yakni sebesar 0,23. Yang mana nominal ini menjelaskan bahwa, apabila terjadi peningkatan penilaian terhadap motivasi anggota maka pengurus semakin aktif.

Motivasi anggota yang dimaksudkan disini guna mengukur keaktifan pengurus ialah, seberapa besar peranan pengurus dalam mempengaruhi anggota untuk selalu membayar kewajiban/ angsuran tepat waktu, datang pada rapat anggota tahunan.

Berdasarkan hasil observasi, menyatakan banyak pengurus yang jarang berkunjung ke kantor dikarenakan telah memberikan kepercayaan pengelolaan koperasi dengan mengangkat (memperkerjakan) seseorang yang profesional, sehingga secara tidak langsung jarang terjadi interaksi antara pengurus dan anggota, sehingga bentuk motivasi yang diberikan kepada anggota ialah disampaikan melalui para staf koperasi syariah.(berdasarkan observasi)

Setelah dilakukan olah data, pada variabel keaktifan pengurus dalam meningkatkan kinerja keuangan koperasi syariah. Ternyata variabel keaktifan pengurus memiliki pengaruh tidak langsung (negatif) dan tidak signifikan, terlihat pada gambar 4.2. Dimana nilai β yang bernilai negatif yakni sebesar - 0,19 dan P- value sebesar 0.37 lebih besar dari 0,05. Serta R^2 nya bernilai 0,04, hal ini menunjukkan bahwa keaktifan pengurus hanya berpengaruh sebanyak 4% dalam meningkatkan kinerja keuangan, sisanya sebanyak 96% di pengaruhi oleh variabel lain diluar variabel dalam penelitian ini. Dapat disimpulkan pula bahwa di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta keaktifan pengurus tidak memiliki pengaruh dalam meningkatkan kinerja keuangan. Ada berapa alasan-alasan yang memungkinkan menjadi penyebab tertolaknya hipotesis 5, yakni sebagai berikut:

1. Pengurus belum maksimal dalam memotivasi anggota

Berdasarkan penelitian yang sedang dilakukan oleh Rahma dan Pratiwi¹³ (2018) menjelaskan bahwa 30% anggota tidak pernah mengikuti RAT serta 22% anggota jarang menghadiri RAT. Hal ini menunjukkan masih kurangnya partisipasi anggota dalam RAT. Padahal RAT merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada koperasi yang mana didalam pelaksanaan RAT inilah dipaparkan segala rancangan kinerja dan permasalahan yang ada pada koperasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa selama ini pengurus belum maksimal dalam memotivasi anggota untuk dapat berperan aktif dalam perkoperasian.

¹³ Penelitian yang sedang dilakukan oleh Rahma, Fauziah dan Amelia Pratiwi Program studi Ekonomi Syariah pada tahun 2018 dengan judul “ Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Kekoperasian Anggota Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Syariah”

2. Pengurus belum melaksanakan kegiatan pengembangan keanggotaan dengan maksimal.

Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar koperasi syariah di Yogyakarta masih ada yang belum menyelenggarakan pelatihan pengembangan untuk anggota, seperti pelatihan pengembangan UKM, pendidikan kekoperasian. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan Rahma & Pratiwi, menunjukkan bahwa 58,43% koperasi tidak melaksanakan pelatihan kekoperasian. Padahal, pelatihan serta pendidikan kekoperasian dapat membantu serta menambah motivasi anggota untuk lebih giat dalam memperbaiki kualitas diri serta dapat memunculkan jiwa wirausaha dalam diri setiap anggota. Sehingga nantinya apabila anggota giat membayar angsuran tepat waktu, mau menyisihkan uangnya untuk dana suka rela dan dana lainnya, hal ini dapat meningkatkan kinerja keuangan serta mengurangi pembiayaan yang bermasalah (pembayaran angsuran yang telat).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keaktifan pengurus dengan nilai kinerja pengurus memiliki pengaruh dalam peningkatan kinerja keuangan koperasi syariah. Sebagaimana yang tertera pada gambar 4.1, dari nilai p- valuenya < 0.05 yakni (< 0.01).
2. Akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keaktifan pengurus, dengan nilai p- valuenya < 0.05 yakni sebesar (< 0.01) dan β yang bernilai positif yakni sebesar 0,32.
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. dengan nilai p- valuenya < 0.05 yakni sebesar (< 0.01), dan nilai β yakni sebesar 0,24.
4. Motivasi Anggota memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keaktifan pengurus. Sebagai mana yang tertera pada gambar 4.1, dengan nilai p- valuenya < 0.05 yakni sebesar (< 0.01), dan nilai β yakni sebesar 0,20.
5. Keaktifan pengurus dalam meningkatkan kinerja keuangan koperasi syariah tidak memiliki pengaruh secara langsung (negatif) dan tidak signifikan,

terlihat pada gambar 4.2, dimana β bernilai positif yakni sebesar -0,19 dan P- value sebesar 0.37 lebih besar dari 0.05. Saran untuk peneliti selanjutnya, yakni :

1. Melakukan penelitian dengan data laporan keuangan yang lebih dari dua tahun sehingga dapat melihat pengaruh keaktifan pengurus terhadap kinerja pengurus untuk jangka waktu yang panjang.
2. Menambah atau bahkan mengurai variabel yang digunakan dalam mengukur keaktifan pengurus.
3. Menambahkan variabel untuk mengukur kinerja keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdillah,Willy. (2015) *Partial Least Square :Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: ANDI

Burhanuddin. (2013). *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN- MALIKI PRESS.

Hasibuan,Malayu S.P, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi

Kartasapoetra, (1992). *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA

Ma'ruf,Ahmad. (2013). *Ekonomika Koperasi* jilid 1. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara.

Munaldus, Yuspita Karlana,Herlina. (2014). *Kiat mengelola Credit Union*. Jakarta: PT Elex MediaKomputindo

Reformasi Bidang Ekonomi, D. Soemarmo, (1998). *KOPERASI Meningkatkan Kemandirian Usaha Menengah dan KUD*. Jakarta:PT. Sekala Jalakarya UU No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Sholihin,P dan Dwi Ratmono. (2013). *Analisis SEM-PLS dengan Warp PLS 3.0: Untuk Hubungan non linier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta:ANDI.

Sito.Arifin, Halomoan Tamba. (2001) *Koperai: Teori dan Praktik*. Jakarta: ERLANGGA

Soewardi,Herman. (1995) *Filsafat Koperasi atau Cooperativism*. Bandung: UPT Penerbit IKOPIN.

Sukamdiyanto.Ign. (1999) *Manajemen Koperasi*. Jakarta :Erlagga.

Winardi (2002), *Motivasi dan Pemasaran dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomer 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi

Artikel

Ady Soejoto, SE., M.Si (2015) Upaya Pengurus Koperasi Untuk Meningkatkan Partisipasi Anggota DiKoperasi Wanira Harum Melati Karang Pilang Surabaya. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* Vol 3, No 2 Diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2018. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jupe/artikel/view/12112/11268>.

Agustia Devi,Nunung Kusnadi dan Harianto. (2017). Studi Empiris Prilaku Usaha Koperasi Pertanian : Kasus Koperasi di Dataran Tinggi Gayo Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen & Aribisnis*, Vol. 14 No 1: 12-21. Diakses pada tanggal 25 Mei 2018. <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jmagr/article/view/15439/0>
media.neliti.com/media/publications/23534-ID-tanggung-jawab-pengurus-koperasi-simpan-pinjam-berbadan-hukum-terhadap-penyimpan.pdf.

Burhanuddin Yusuf, (2016) *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Volume 6 (1)*, Hal: 101 - 112 Diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2018.

<http://www.jurnal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/artikel/view/3124>.

- Iskandar, Kusnardani Bintang. (2015). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dan Pengendalian Internal. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol.4 No.10:1-18. Diakses pada tanggal 25 Mei. <https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/view/1078/1033>.
- Ikhsan Dwi Anggoro, (2017) Pengaruh Partisipasi Anggot, Kepemimpinan Pengurus, dan Partisipasi Pemberian Kredit Terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Rasa Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Volume 6, Nomor 4, Tahun 2017*. Diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2018 : <http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/penelitian/article/view/46/645>
- Nugraha Wahyu Singgih. (2015). Nilai Aset BMT di Yogya Tumbuh Hingga 900 miliar. *Tribun Jogja*. Diakses pada tanggal 28 Mei. <http://jogja.tribunnews.com/2015/11/11/aset-bmt-di-yogya-tumbuh-hingga-rp-900-miliar>.
- Rahayu, Tantri, Dr. Kardoyo, M.Pd (2014) Pengaruh Kinerja Pengurus dan Karyawan Terhadap Keaktifan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Se Kecamatan Winong Kabupaten Pati. *EEAJ 3 (2) (2014) Economic Education Analysis Journal*. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj/article/view/4027/3831>
- Rinda Asytuti (2011) Penilaian Kesehatan Keuangan Pada KOSPINJASA Syariah Pekalongan Sebagai Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Penelitian[S.I]* Vol. 8, No.1 Diakses Pada tanggal 21 Oktober 2018. <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/penelitian/articel/view/46/0>
- Rahma, Fauziah (2018) *Analisis Pengaruh Tingka Literasi Kekoperasian Anggota Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Syariah*.
- Tansilus, Aminuyati, dan Syahrudin Husni. (2015). Analisis Kinerja Pengurus Koperasi dalam Meningkatkan SHU Anggota Pada Koperasi Karyawan Himpunan Pos Indonesia Pontianak. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* Vol 4, No 5:1-12. Diakses pada tanggal 25 Mei 2018. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/10017/9773>.
- Tomi Sujadmiko. (2017). Tiga Tahun Kabinet Kerja Kemenkop dan UKM Dongkrak PDB Koperasi dan Rasio Kewirausahaan. *KRJogja*. Diakses pada tanggal 17 Oktober. <http://krjogja.com/web/news/read/46906/home3.html>.

Unang Yunasaf, (2005). Kepemimpinan Pengurus Koperasi Dalam Mendinamiskan Organisasi Koperasi (Kasus Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) tandang sari, Sumedang. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora* Vol 7, No 2. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2018. <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5550>.

media.neliti.com/media/publications/23534-ID-tanggung-jawab-pengurus-koperasi-simpan-pinjam-berbadan-hukum-terhadap-penyimpan.pdf

Wahyu, Widhiarso. Reliabilitas dan Validitas dalam Pemodelan Persamaan Struktural. Draf pengayaan matakuliah .Universitas Gajah Mada . diakses pada tanggal 22 januari 2019 SEM<https://elisa.ugm.ac.id/user/archive/download/148872/4350cba55f70221c534188511a29c2b3>